



SUMBER BERITA

JUM'AT, 19 OKTOBER 2018

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Gusnan Akui Pertemuan Di Riung Bandung

BENGKULU - Sidang perkara suap fee proyek mendudukkan Bupati Bengkulu Selatan (Nonaktif) Dirwan Mahmud sebagai terdakwa kembali digelar kemarin. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi itu menghadirkan Plt Bupati BS Gusnan Mulyadi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK meminta Gusnan untuk menceritakan ada atau tidak pertemuan di rumah Makan Riung Bandung dengan Juhari alias Jukak tahun 2015 lalu saat persiapan kampanye Pilbup BS.

Dalam kesaksiannya Gusnan menjelaskan di hadapan Majelis Hakim yang diketuai oleh Slamet Suropto, Gabriel Sialagan dan Rahmat, bahwa benar telah terjadi pertemuan di rumah Makan Riung Bandung tersebut.

Saat itu dia hadir bersama Dirwan Mahmud, kemudian Jukak bersama dengan Haidin keduanya merupakan tim sukses. Saat itu kata Gusnan dia dan Dirwan Mahmud selaku calon Bupati-Wakil Bupati meminta bantuan secara maksimal untuk kemenangan Pilkada kepada Jukak dan Haidin.

Pada saat itu Jukak dan Haidin menyampaikan nanti setelah mendukung mereka tidak mau kecewa jika Dirwan-Gusnan memenangkan Pilkada. Sehingga mereka bertanya apa yang akan didapatkan oleh mereka jika menang? Pertanyaan itu dijawab oleh Dirwan, kalau nanti menang dan dilantik menjadi Bupati, maka akan diberikan kesempatan terlibat dalam pembangunan di BS, Terutama di sisi proyek. "Pak Dirwan mengatakan nanti kalau kita dilantik, untuk pekerjaan proyek akan diberikan kesempatan pada mereka. Kalau saya mengatakan saya wakil, jadi ikut kebijakan bupati," katanya.

Gusnan juga mengatakan, Dirwan di lain kesempatan juga pernah menjanjikan pada Jukak untuk didorong menjadi anggota DPRD Bengkulu Selatan. Jukak saat itu meminta supaya Dirwan tidak berbohong. "Saya mengatakan, saya selaku wakil bupati akan mengingatkan janji Pak

Dirwan ini ketika menjadi Bupati pada Jukak," kata Gusnan.

Janji-janji itu menurut Gusnan juga disampaikan pada tim sukses yang lain. Kalau tim sukses atau tim relawan itu PNS, maka akan diberikan jabatan. Jika berasal dari kalangan swasta maka akan diberikan proyek pekerjaan. "Ya seperti itu," katanya.

Jaksa kemudian menggali lebih dalam, apakah janji yang disampaikan Dirwan Mahmud pada tim suksesnya ada yang terealisasi saat mereka sudah menjabat sebagai Bupati-Wakil Bupati BS. Gusnan menjawab tidak tahu. Dia juga belum pernah mengingatkan Dirwan Mahmud setelah dilantik menjadi Bupati untuk menepati janjinya pada Juhari. Apakah Juhari pernah diberikan proyek di Dinas PU, Gusnan menjawab pernah mendengar kabar itu. "Saya juga jarang berkomunikasi dengan Jukak. Jadi saya tidak tahu apakah janji dulu itu sudah terealisasi," katanya.

Gusnan juga mengatakan, kalau dari masyarakat memang dia mendengar kabar ada pemberian fee pada bupati dan kepala dinas untuk pengurusan proyek, terutama di Dinas PU. Kabar yang didengar itu fee itu mulai dari kepala dinas sampai ke bupati. Namun dia tidak mau menggali lebih jauh informasi itu. Secara umum dia juga pernah mendengar tim sukses dan keluarga bupati pernah dapat proyek pembangunan. "Saya pada dasarnya tidak berani mengingatkan," katanya.

Pernyataan Gusnan ini kemudian langsung dijawab oleh JPU KPK "Harusnya saudara ingatkan, mengapa

dibiarkan? Apa dibiarkan saja dia sampai akhirnya ditangkap" kata JPU.

Pernyataan JPU itu kemudian dibalas oleh Gusnan. "Saya selaku Wabup tidak pernah tanyakan pada kadis termasuk PUPR terkait fee proyek itu, sebab ini sangat sensitif hubungannya langsung dengan bupati. Kalau saya menanyakan Saya takut dikira minta proyek juga," kata Gusnan.

Dia juga mengatakan, dari mulut ke mulut juga pernah mendengar anggota DPRD BS kebagian jatah proyek juga. Namun sejak dia menjadi Plt Bupati, sampai sekarang tidak ada anggota dewan yang minta proyek padanya. "Saya juga mencoba menyampaikan pada ketua DPRD, saya mohon kalau bisa tidak ada komitmen-komitmen (dalam mengesahkan APBD). Bahkan saya rekam saat itu. Jika rekan-rekan dewan tidak mau ketuk palu APBD, saya jalankan APBD pakai Perbup saja," katanya.

Gusnan juga bercerita dua bulan setelah dilantik menjadi wakil bupati, ajudannya bernama Sigit mendapatkan telepon dari Kepala SMAN 2 BS. Kepala sekolah itu mengakui didatangi seseorang bernama Sarim. Katanya disuruh oleh Hendrati (terdakwa) yang juga istri muda Dirwan Mahmud. Dia meminta kepala SMAN 2 BS tersebut membantu memasang pendingin udara (AC) di rumah pribadi mereka, yakni rumah kolam. "Berdasarkan laporan itu Sigit langsung meminta pada kepala SMAN 2 itu supaya tidak memberikan bantuan apapun untuk pemasangan AC itu. Jadi uangnya tidak jadi diberikan," terangnya. (del)